TATA KELOLA KOLABORATIF PEMERINTAH DALAM PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN BANYUMAS

Muhammad Annas Syaiful Haq
NPP. 33.0462
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: annassh888@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Afif Syarifudin Yahya, S.IP., M.Si.
Email: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Stunting management in Banyumas Regency has been supported through various initiatives and regulations, including Banyumas Regent Regulation Number 59 of 2023 concerning the Behavior Change Communication Strategy for Accelerating Stunting Reduction. However, its implementation in the field has not yet been optimal due to limited human resource capacity, weak data integration, the dominance of government actors in decision-making processes, and the lack of substantive participation from non-government stakeholders. .* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in handling stunting in Banyumas Regency, identify inhibiting factors, and formulate strategies to strengthen collaboration.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with six key informants, field observations, and documentation from relevant stakeholders including local government agencies, health workers, private sector (CSR), and community representatives.* ***Result:*** *The findings reveal that collaborative governance has been implemented through cross-sectoral involvement encompassing strategic resources, performance drivers, and end results dimensions. However, implementation remains suboptimal due to uneven SDM distribution, weak inter-agency data integration, and government actor dominance in decision-making that hampers equal partnership. Efforts to strengthen collaboration include rembug stunting coordination forums, SDM capacity building, and the utilization of information technology for program monitoring and evaluation.* ***Conclusion:*** *Collaborative governance in stunting prevention in Banyumas Regency has been implemented but requires strengthening of cross-sector coordination mechanisms, substantive participation of non-government actors, and an integrated information system for more effective outcomes.*

Keywords: *Banyumas; Collaborative Governance; Local Government; Stunting*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penanganan *Stunting* di Kabupaten Banyumas telah dilakukan berbagai upaya dan juga diatur oleh beberapa peraturan diantaranya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting. Akan tetapi pada implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena masih terdapat

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya integrasi data, dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi aktor non-pemerintah yang belum substantif dan angka *stunting* masih diatas target angka nasional 14%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor terkait meliputi perangkat daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta (CSR), dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif telah diterapkan melalui keterlibatan lintas sektor yang mencakup dimensi *strategic resources, performance drivers,* dan *end results.* Namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena distribusi SDM yang belum merata, lemahnya integrasi data antarinstansi, dan dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menghambat prinsip kesetaraan dalam kolaborasi. Upaya penguatan meliputi forum rembug *stunting*, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi program. **Kesimpulan:** Tata kelola kolaboratif dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas telah berjalan namun memerlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi substantif aktor non-pemerintah, serta pengembangan sistem informasi terpadu untuk hasil yang lebih efektif.

Kata kunci: Banyumas; Pemerintah Daerah; *Stunting*; Tata Kelola Kolaboratif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab mendasar pemerintah yang tercermin salah satunya melalui kualitas status gizi penduduk. Salah satu indikator paling krusial dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah angka *stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun (Bartolomucci et al., 2026). *Stunting* tidak sekadar persoalan kesehatan individual, melainkan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola urusan wajib pelayanan dasar secara terpadu dan lintas sektor. Data FAO, UNICEF, WFP, dan WHO melalui laporan *Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022* menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan *stunting* sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, di mana Asia Timur berhasil menekan prevalensi hingga 4,9% berkat harmonisasi kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan sanitasi secara konsisten, efektif, dan saling mendukung. Fakta tersebut menegaskan bahwa kawasan yang gagal menurunkan *stunting* oleh tata kelola kolaboratif yang lemah, serta kebijakan yang tidak berkesinambungan (Herawati & Sunjaya, 2022).

Pada tingkat nasional Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan *stunting*. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* nasional mencapai 21,6% pada tahun 2022, menurun menjadi 21,5% pada 2023, dan 19,8% pada 2024, masih jauh di atas target RPJMN 2020–2024 yang menetapkan 14% sebagai batas capaian. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai payung hukum yang mengatur arah kebijakan, strategi, dan mekanisme koordinasi lintas sektor, serta memperkuat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dari tingkat nasional hingga

desa(Hendra & Hasan, 2023.). Pendekatan yang digunakan bersifat integratif dengan menggabungkan intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional. Kompleksitas faktor penyebab *stunting* yang mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, pola asuh, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga menjadikan intervensi harus bersifat multisektoral dan tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja(Wijayanti et al., 2023).

Tabel 1.
Prevalansi *Stunting* Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Prevalensi *Stunting* Nasional	Total Balita (Ribu)	Total Balita *Stunting*
2022	21,6%	22.094,4	± 4.772.390
2023	21,5%	22.511,8	± 4.840.037
2024	19,8%	22.638,1	± 4.482.340

Sumber: Dokumen Internal Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Pada tingkat nasional Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan *stunting*. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* nasional mencapai 21,6% pada tahun 2022, menurun menjadi 21,5% pada 2023, dan 19,8% pada 2024, masih jauh di atas target RPJMN 2020–2024 yang menetapkan 14% sebagai batas capaian. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai payung hukum yang mengatur arah kebijakan, strategi, dan mekanisme koordinasi lintas sektor, serta memperkuat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dari tingkat nasional hingga desa(Suripto, 2024). Pendekatan yang digunakan bersifat integratif dengan menggabungkan intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional. Kompleksitas faktor penyebab *stunting* yang mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, pola asuh, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga menjadikan intervensi harus bersifat multisektoral dan tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja (Wijayanti et al., 2023).

Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, prevalensi *stunting* di Kabupaten Banyumas mencapai 19,6%, jauh di atas angka provinsi yang sebesar 17,1%, dengan total kasus balita *stunting* mencapai 14.263 anak yang tersebar di seluruh 27 kecamatan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Cilongok (1.549 kasus), Sokaraja (880 kasus), Sumbang (820 kasus), dan Ajibarang (719 kasus). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa tren kenaikan kasus dari tahun 2022 ke 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengindikasikan bahwa program intervensi dan kolaborasi lintas sektor belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Bupati Banyumas dalam forum Rembug *Stunting* 2025 menegaskan bahwa keberhasilan penanganan *stunting* tidak dapat bertumpu hanya pada pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara seluruh

pihak termasuk Puskesmas, organisasi profesi, sektor swasta, media massa, dan masyarakat(Meilinda et al., 2025). Sebagai pemerintah daerah yang baik seharusnya komitmen untuk menjaga kesejahteraan itu harus diutamakan dengan berkolaborasi agar dapat menjadikan hasil lebih optimal dan minimnya penyelewengan kekuasaan (Yahya et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas belum berjalan secara maksimal dan memerlukan kajian yang mendalam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan antara adanya komitmen kebijakan lintas sektor dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas dengan realitas implementasi yang belum berjalan optimal. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan berbagai Peraturan Bupati Banyumas terkait, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai oleh keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya integrasi data, serta partisipasi non-pemerintah yang belum substantif. Secara normatif, kerangka regulasi penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas telah tersedia secara memadai, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang RAN-PASTI, hingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*. Seluruh regulasi tersebut secara eksplisit mengamanatkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan berbagai aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Namun terdapat kesenjangan yang nyata antara desain kebijakan yang sudah komprehensif dengan realitas implementasi di lapangan, di mana angka *stunting* Kabupaten Banyumas masih berada jauh di atas target nasional 14%, dan forum Rembug *Stunting* 2025 masih terus mendiskusikan persoalan yang sama, yakni belum meratanya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan *stunting (Wijayanti et al., 2023)*.

Tata kelola kolaboratif yang seharusnya melibatkan Dinas Kesehatan dan KB sebagai *leading sector*, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bappeda sebagai perencana pembangunan, belum berjalan sinergis. Masih terdapat dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan. Aktor non-pemerintah seperti CSR Bank Jateng, Tim Penggerak PKK, kader posyandu, dan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman terlibat, namun partisipasinya masih bersifat simbolis, bukan substantif(Matovu et al., 2026). Kehadiran mereka dalam forum belum disertai dengan mekanisme pengambilan keputusan bersama, berbagi data, maupun pembagian tanggung jawab (*shared responsibility*) yang proporsional(Sumarno & Salsabila, 2026). Keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya distribusi tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta absennya sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data *stunting* antarinstansi menjadi hambatan struktural yang belum teratasi. Data *stunting* masih tersebar di berbagai platform yang tidak terhubung, sehingga menyulitkan perencanaan berbasis data dan pemantauan capaian secara akurat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan penelitian yang signifikan, karena studi-studi terdahulu tentang penanganan *stunting* di Indonesia belum secara spesifik menganalisis bagaimana tata kelola kolaboratif beroperasi di tingkat kabupaten dengan menggunakan kerangka yang memadukan dimensi *strategic resources*, *performance drivers*, dan *end results* (Carmine Bianchi, Luis F. Luna-Reyes, 2020).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilaksanakan karena Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan *stunting* yang serius dengan prevalensi 19,6% pada tahun 2024 dan jumlah kasus absolut mencapai 14.263 anak yang tersebar di seluruh kecamatan, sementara upaya penanganan melalui kolaborasi lintas sektor belum berjalan optimal sehingga target nasional 14% terus meleset. Tanpa kajian empiris yang mendalam tentang bagaimana tata kelola kolaboratif pemerintah sesungguhnya bekerja, para pemangku kebijakan akan kekurangan dasar analitis yang kuat untuk merumuskan strategi penguatan yang tepat sasaran. Apabila persoalan ini tidak segera diteliti dan ditindaklanjuti, kesenjangan antara komitmen kebijakan formal dan realitas implementasi lapangan akan terus melebar, mengakibatkan program penanganan *stunting* berjalan tidak efisien, pemborosan anggaran, dan yang paling serius adalah semakin banyaknya anak Banyumas yang terdampak *stunting* dengan konsekuensi jangka panjang berupa penurunan kualitas SDM, produktivitas, dan daya saing daerah. Penelitian ini juga mendesak secara praktis bagi pengambil kebijakan daerah karena menawarkan rekomendasi berbasis data tentang penguatan mekanisme koordinasi, peningkatan partisipasi substantif aktor non-pemerintah, dan pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat langsung diimplementasikan untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Banyumas.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan suatu permasalahan yang terjadi dan juga dalam penanganan *stunting*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian literasi dan pemberdayaan masyarakat memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Quamme dan Iversen dalam jurnalnya mengkaji model tata kelola kolaboratif melalui studi komparatif terhadap 137 kasus di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kasus kualitatif komparatif dengan pendekatan teori institusional (Quamme & Iversen, 2022). Kemudian terdapat Penelitian berikutnya yaitu dikaji Rajendrakumar dan rekannya oleh yaitu mengembangkan kerangka integratif *collaborative governance regime* (CGR) yang mencakup sistem penggerak (*drivers*), dinamika kolaborasi (*collaborative dynamics*), dan aksi kolaboratif (*collaborative actions*) serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode telaah literatur sistematis dan pengembangan kerangka teori, menekankan bahwa kolaborasi berhasil apabila terdapat tekanan situasional, insentif bersama, dan kepemimpinan yang visioner (Rajendrakumar et al., 2025).

Penelitian Abdullah dan rekannya dalam jurnalnya melakukan penelitian tentang kolaboratif pemerintahan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian menemukan bahwa kebijakan konvergensi mampu meningkatkan *acceptability*, *adoption*, dan keterpaduan program spesifik dan sensitif, namun implementasi di level kecamatan dan desa masih menghadapi tantangan besar berupa lemahnya kapasitas perencanaan dan koordinasi (Abdullah et al., 2025). Penelitian Bartolomucci dan rekannya dalam jurnalnya meneliti efektivitas aksi kolaborasi dalam menurunkan prevalensi *stunting* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif mixed method. Hasil penelitian menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki potensi menurunkan prevalensi *stunting*, namun dampaknya tidak seragam karena dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen kepemimpinan daerah.

Penelitian Costabile dalam jurnalnya memperkenalkan *stunting convergence management framework* berbasis integrasi sistem yang menekankan perlunya mekanisme tata kelola yang jelas, sistem informasi terpadu, dan koordinasi kuat antarinstansi. Keduanya memberikan kontribusi diagnosis permasalahan kolaborasi, namun cenderung berhenti pada solusi normative (Costabile, 2024). Kemudian penelitian terdahulu berikutnya oleh Danso dan Appiah menjelaskan bahwa kolaboratif dalam penanganan permasahalan yang kompleks dapat menjadikan sebuah solusi yang baik. Hal itu dikarenakan dengan kolaboratif maka akan lebih mudah membagi bagian kerjanya dalam penanganan *stunting* (Danso & Appiah, 2023). Penelitian Ahmad juga menjelaskan bahwa unsur kolaboratif merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan *stunting* di daerah karena merupakan penggerak. Hal itu mengakibatkan adanya gambaran dalam melakukan penelitian berikutnya (Ahmad, 2021).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting berfokus pada pengembangan model konseptual, evaluasi implementasi kebijakan secara umum, maupun identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek teori, kebijakan, dan karakteristik objek penelitian yang dikaji. Segi aspek teori, penelitian Rajendrakumar dan rekanya mengembangkan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) melalui telaah literatur sistematis dan menekankan pentingnya tekanan situasional, insentif bersama, serta kepemimpinan visioner dalam mendorong kolaborasi (Rajendrakumar et al,2025). Abdullah dan rekannya menemukan bahwa kebijakan konvergensi stunting mampu meningkatkan keterpaduan program, namun masih menghadapi kendala koordinasi dan kapasitas perencanaan di tingkat local (Abdullah et al., 2025). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menerapkan teori *Collaborative Governance* untuk menjelaskan secara empiris hubungan antara sumber daya, kepemimpinan, koordinasi, dan proses kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Banyumas.

Aspek metode dan fokus analisis, Quamme dan Iversen menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk mengkaji pengaruh kapasitas anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan kepemimpinan daerah terhadap capaian penurunan stunting (Quamme & Iversen 2022). Costabile memperkenalkan *stunting convergence management framework* yang menekankan pentingnya integrasi sistem dan koordinasi antarinstansi, namun masih berorientasi pada pengembangan kerangka konseptual. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam proses tata kelola kolaboratif, interaksi antaraktor, mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan stunting (Costabile, 2024).

Dari aspek kebijakan dan karakteristik objek penelitian, Danso dan Appiah menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan solusi efektif dalam menangani permasalahan kompleks karena memungkinkan pembagian tugas antaraktor (Danso dan Appiah, 2023). Penelitian Ahmad menegaskan bahwa unsur kolaboratif merupakan faktor penting dalam percepatan penurunan stunting di daerah (Ahmad, 2021). Kedua penelitian tersebut masih membahas kolaborasi secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi berbagai kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, pemerintah desa, sektor

swasta, dan masyarakat dalam satu sistem kolaborasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian eviden empiris mengenai praktik tata kelola kolaboratif pada konteks lokal Kabupaten Banyumas, termasuk kondisi sumber daya, integrasi data, koordinasi lintas sektor, hambatan implementasi, serta capaian yang dihasilkan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, multidimensional, dan melibatkan interaksi berbagai aktor yang tidak dapat dipahami hanya melalui data kuantitatifsugiyo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika koordinasi, perbedaan kepentingan, serta proses kolaborasi antaraktor dalam konteks nyata penanganan *stunting*. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan tata kelola kolaboratif, faktor penghambat, dan upaya penguatannya berdasarkan kerangka *Collaborative Governance* Bianchi (2020). Pendekatan ini dinilai relevan untuk memahami kondisi *stunting* di Kabupaten Banyumas yang masih mencapai 19,6% pada tahun 2024 (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang memadukan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif penanganan *stunting*. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai interaksi antar pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat. Analisis dokumen mencakup laporan program, dokumen kebijakan, notulensi Rembug *Stunting*, serta berbagai publikasi resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan *stunting*. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi dan digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh.

Sumber data penelitian berasal dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, peran strategis, dan pengetahuan yang mendalam mengenai program penanganan *stunting*. Informan terdiri atas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Sub Koordinator Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Banyumas sebagai representasi unsur pemerintah daerah. Selain itu, penelitian juga melibatkan Divisi CSR Bank Jateng Cabang Purwokerto, kader PKK dan Posyandu, serta akademisi ahli gizi dari Universitas Jenderal Soedirman sebagai representasi sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tata kelola kolaboratif dari berbagai perspektif (Sugiyono, 2022).

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber

dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Parlina et al., 2024). Peneliti juga menerapkan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan kondisi yang sebenarnya. Transferabilitas dijaga melalui penyajian konteks penelitian secara rinci, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2022). Data yang diperoleh diseleksi dan difokuskan sesuai indikator tata kelola kolaboratif kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinsos P3A, Bapperida Kabupaten Banyumas, Bank Jateng Cabang Purwokerto, serta lokasi kegiatan PKK dan Posyandu. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, yaitu pada 5 Januari hingga 25 Januari 2026, melalui observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Seluruh proses penelitian diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan, hambatan, dan upaya penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas menggunakan teori Bianchi (2020) yang mencakup tiga dimensi: *Strategic Resources, Performance Drivers,* dan *End Results* (Carmine Bianchi, Luis F. Luna-Reyes, 2020).

3.1. *Strategic Resources*

Dimensi *strategic resources* dalam tata kelola kolaboratif penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas mencakup empat indikator utama: jumlah dan kualitas SDM, dukungan anggaran, infrastruktur dan teknologi pendukung, serta jumlah kolaborasi dengan organisasi eksternal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Sub Koordinator Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Ibu Henny Sutikno, S.SiT., M.Kes., terungkap bahwa “ketersediaan tenaga gizi di tingkat Puskesmas masih belum merata beberapa Puskesmas bahkan hanya memiliki satu tenaga gizi yang merangkap fungsi administrasi dan pelayanan lapangan secara bersamaan”. Kondisi ini menyebabkan pemantauan tumbuh kembang anak balita di wilayah dengan kasus *stunting* tinggi seperti Kecamatan Cilongok (1.549 kasus), Sumbang (820 kasus), dan Sokaraja (880 kasus) tidak dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian terdapat anggaran dalam penyelesaian permasalahan ini.

No.	Perangkat Daerah	Belanja Operasi* (rupiah)	Belanja Modal* (rupiah)	Belanja Tak Terduga* (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat Daerah	45.665.469.214	855.772.691	-
2	Sekretariat DPRD	68.375.597.219	1.712.855.313	-
3	Inspektorat Daerah	17.551.191.587	3.626.860.809	-
4	Dinas Pendidikan	1.107.329.745.744	89.707.077.344	-
5	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	7.947.536.785	695.656.485	-
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.121.176.689	359.274.830	-
7	Dinas Kesehatan	230.072.874.271	20.592.984.820	-
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.908.216.007	1.318.131.117	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	24.895.338.606	10.329.547.672	-
10	Dinas Pekerjaan Umum	73.901.185.174	120.724.719.458	-
11	Dinasparbudpar	42.166.441.292	4.126.167.826	-
12	DPMPTSP	9.255.518.094	22.000.000	-
13	DPPKBP3A	25.106.772.616	2.026.720.887	-
14	Dinas Perhubungan	50.455.565.835	6.616.032.801	-
15	Dinas Perikanan dan Peternakan	22.165.830.881	359.274.300	-
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.765.688.947	705.248.257	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.319.190.607	112.004.300	-
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	44.654.880.237	13.253.711.677	-
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	14.140.766.325	269.639.700	-
20	Dinaspormasdes	19.992.638.604	289.204.496	-

Sumber: Dokumen Internal Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Gambar 1.

Anggaran Alokasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas

Berdasarkan gambar 1 hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting* melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, dana desa, hingga dukungan CSR dari sektor swasta. Bank Jateng Cabang Purwokerto, melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), secara spesifik mengalokasikan dana bantuan untuk intervensi balita berisiko *stunting* dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Berdasarkan pengakuan Ibu Shafira Latifa Dinar, S.K.M. dari Bank Jateng, "kolaborasi ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem perencanaan terpadu bersama pemerintah daerah, sehingga ada potensi duplikasi sasaran dan ketidaktepatan intervensi di lapangan". Kemudian terdapat Infrasturktur dan Teknologi yaitu dengan menggunakan aplikasi dalam membantu sesuai dengan gambar 4. Hal itu menjelaskan bahwa aplikasi dapat membantu dalam penginputan angka *stunting* yang ada di Banyumas dengan hal ini maka aplikasi dapat mendorong dalam penanganan *stunting* yang ada di Kabupaten Banyumas



Sumber: *Apps on Google Play*

Gambar 2.

Aplikasi LARASKIA (Layanan Rekam *Stunting* dan Informasi Kesehatan Ibu dan Anak)

Pada indikator infrastruktur dan teknologi, observasi lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas telah mengembangkan Aplikasi LARASKIA (*Layanan Rekam Stunting dan Informasi Kesehatan Ibu dan Anak*) sebagai sistem informasi berbasis digital untuk memantau data *stunting* secara *real time*. Akan tetapi, pemanfaatan aplikasi ini belum optimal di seluruh wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan infrastruktur internet yang terbatas. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Banyumas, Bapak Joko Nova Arianto, yang menyatakan bahwa integrasi data antar-OPD masih menjadi tantangan besar karena masing-masing instansi cenderung menggunakan sistem pendataan yang berbeda sehingga menyulitkan sinkronisasi dan pengambilan keputusan berbasis data secara kolaboratif". Aspek kolaborasi dengan organisasi eksternal, hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas telah menjalin komitmen kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jateng, Tim Penggerak PKK, Universitas Jenderal Soedirman, dan kader Posyandu. Namun, keterlibatan pihak-pihak non-pemerintah tersebut masih belum proporsional. PKK, menurut pengakuan pengurus Ibu Siti Latifah mengatakan bahwa "menghadapi kendala minimnya insentif kader dan kurangnya pelatihan teknis berkelanjutan, sementara kontribusi akademisi dari UNSOED belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan".

3.2. *Performance Drivers*

Dimensi *performance drivers* dalam kerangka Bianchi (2020) mencakup tiga indikator utama, yaitu produktivitas layanan (*service productivity*), kapabilitas layanan (*service capability*), dan efisiensi penyampaian layanan (*efficiency of service delivery*). Terkait produktivitas layanan, hasil wawancara dengan Ibu Henny Sutikno dari Dinkes KB menjelaskan bahwa "program timbang serentak dan pemantauan pertumbuhan melalui Posyandu telah rutin dilaksanakan di seluruh kecamatan". Produktivitas layanan ini tidak merata: kecamatan dengan aksesibilitas lebih baik seperti Purwokerto menunjukkan tingkat kehadiran balita yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan terpencil seperti Lumbir dan Gumelar. Berdasarkan data yang dihimpun, total kasus *stunting* di Kabupaten Banyumas tahun 2024 masih mencapai 18.289 anak (4.026 baduta dan 14.263 balita), angka yang memperlihatkan bahwa produktivitas layanan yang ada belum mampu menekan kasus secara signifikan sesuai target nasional 14%. Hal itu sesuai pada tabel 1 yang menjelaskan bahwa terdapat produktivitas antar aktor yang dapat mendorong penanganan *stunting.*

Tabel 2.

Produktivitas Layanan Antar Aktor

No	Aktor	Peran Kolaboratif	Capaian Hasil
1	Universitas Jenderal Soedirman	Riset & pendampingan masyarakat	Kegiatan KKN tematik, edukasi gizi, data penelitian
2	Dinkes KB Banyumas	Pelaksana utama intervensi kesehatan	dukungan program gizi monitoring balita
3	Dinsos P3A Banyumas	Intervensi sosial & keluarga risiko	Penyaluran bantuan sosial alat antropometri
4	CSR Bank Jateng	Dukungan pembiayaan & sarana	Bantuan dukungan anggaran 1 Milyar

No	Aktor	Peran Kolaboratif	Capaian Hasil
5	PKK	Edukasi & mobilisasi masyarakat	Penyuluhan gizi, kampanye pola asuh
6	Posyandu	Layanan kesehatan dasar	Penimbangan, pencatatan tumbuh kembang
7	Bapperida Banyumas	Koordinator perencanaan	Dokumen konvergensi, rembuk *stunting*

Sumber: dikominfo.banyumaskab.go.id. (2025Kolaborasi untuk Generasi Sehat

Pada indikator kapabilitas layanan, observasi lapangan dan analisis dokumentasi memperlihatkan bahwa *Rembug Stunting* yang digelar di Pendopo Si Panji Purwokerto pada 15 Juli 2025 menjadi forum utama koordinasi lintas OPD. Dalam forum tersebut, Kepala DPPKBP3A menyatakan bahwa penanganan *stunting* difokuskan di Kecamatan Cilongok, Sumbang, dan Kembaran sebagai kecamatan prioritas. Namun, kapabilitas kolaboratif forum ini masih dipertanyakan berdasarkan pernyataan Ibu Meita Dwi Farhani, S.STP., M.Si. dari Dinsos P3A bahwa "koordinasi lintas OPD dalam forum tersebut masih didominasi oleh pemerintah daerah tanpa pelibatan yang substantif dari aktor non-pemerintah". Hal itu sehingga prinsip *joint action* dan *shared responsibility* yang menjadi inti *collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015) belum terwujud sepenuhnya. Kondisi ini dikuatkan oleh pernyataan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam forum konsultasi publik bidang kesehatan tahun 2025 bahwa keberhasilan program tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara semua pihak.

Efisiensi penyampaian layanan menjadi indikator yang paling kritis dalam konteks penanganan *stunting* Banyumas. Hasil wawancara dengan Ibu Destya Ningtyas, S.Gz. dari UNSOED menegaskan bahwa program intervensi gizi spesifik maupun sensitif yang dilaksanakan oleh berbagai OPD dan mitra belum sepenuhnya konvergen masih terdapat tumpang tindih program di satu wilayah dan kekosongan intervensi di wilayah lain. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan data dari Aplikasi LARASKIA sebagai basis pengambilan keputusan alokasi layanan. Kader Posyandu, Ibu Desy, menambahkan bahwa "jadwal pelaksanaan program dari berbagai instansi kerap berbenturan satu sama lain, sehingga masyarakat dan kader justru terbebani dengan banyaknya kegiatan yang harus diikuti tanpa koordinasi waktu yang jelas".

3.3. *End Results*

Dimensi *end results* dalam kerangka Bianchi (2020) mencakup tiga indikator: peningkatan kepuasan masyarakat, penurunan persentase permasalahan (*stunting*), dan perubahan manfaat sosial dan ekonomi. Dari sisi penurunan persentase permasalahan, data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Banyumas justru meningkat dari 7.962 kasus pada 2022 menjadi 10.495 kasus pada 2023 dan mencapai 14.263 kasus pada 2024 untuk kategori balita. Kenaikan kumulatif ini mencapai 79,2% dalam dua tahun terakhir, jauh melampaui capaian nasional yang justru menunjukkan penurunan dari 21,6% (2022) menjadi 19,8% (2024). Angka tersebut mempertegas bahwa tata kelola kolaboratif yang diterapkan di Kabupaten Banyumas belum menghasilkan *end result* yang sesuai dengan target Perpres No. 72 Tahun 2021. Hasil dari penanganan *stunting* Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 mengalami penurunan sesuai pada gambar 3.



Sumber: Arsip Infografis Internal Dinas Kesehtan dan Keluarga Berencana Tahun 2026

Gambar 3.

Hasil prevalensi *stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan 2025

Terkait kepuasan masyarakat, wawancara dengan kader Posyandu Ibu Desy dan pengurus PKK Ibu Latifah mengungkapkan bahwa masyarakat pada dasarnya merespons positif kehadiran program-program intervensi *stunting*, terutama yang bersifat langsung seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan tumbuh kembang. Namun, kepuasan tersebut tidak ditopang oleh keberlanjutan program yang konsisten. Banyak kegiatan yang hadir secara sporadis tanpa kesinambungan yang terstruktur. Hal ini diakui pula oleh Ibu Siti Latifah dari PKK, yang menyatakan bahwa minimnya insentif kader dan ketidakjelasan jadwal program dari pemerintah membuat kepercayaan masyarakat terhadap program tata kelola kolaboratif sulit dibangun secara berkelanjutan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *trust building* yang mensyaratkan bahwa kepercayaan harus terus dikembangkan dalam siklus kolaborasi.

Aspek perubahan manfaat sosial dan ekonomi, analisis dokumentasi terhadap program yang berjalan di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa keterlibatan Bank Jateng melalui CSR dan peran UNSOED dalam penelitian gizi memang telah memberikan nilai tambah tertentu. Namun, manfaat tersebut belum terdistribusi secara merata. Kecamatan-kecamatan dengan kasus stunting tertinggi seperti Cilongok, Sokaraja, Sumbang, dan Kembaran belum merasakan dampak yang proporsional dari kolaborasi multi-aktor yang ada. Berdasarkan perbandingan data prevalensi stunting Kabupaten Banyumas tahun 2024 dan 2025, penurunan yang terjadi masih jauh dari target dan tidak merata antarkecamatan, mengindikasikan bahwa distribusi manfaat program kolaboratif belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari program percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya berkelanjutan pada tingkat keluarga sasaran. Meskipun berbagai intervensi telah dilaksanakan, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta dukungan pembiayaan melalui berbagai sumber, masih ditemukan keluarga yang mengalami keterbatasan dalam akses pangan bergizi, sanitasi layak, dan pemanfaatan layanan kesehatan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kolaborasi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan keluarga secara merata. Penguatan strategi kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada pemerataan manfaat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan kapasitas masyarakat agar hasil yang dicapai.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan stunting di Kabupaten Banyumas belum berjalan secara optimal pada dimensi *strategic resources*, *performance drivers*, maupun *end results*. Dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan, keterlibatan aktor non-pemerintah yang masih bersifat simbolis, serta belum meratanya distribusi manfaat program menjadi temuan utama penelitian ini. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Costabile menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh struktur tata kelola, mekanisme koordinasi, dan pembagian peran yang jelas antaraktor (Costabile 2024). Penelitian ini memperkuat temuan Costabile karena menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan dan lemahnya integrasi data antarinstansi di Kabupaten Banyumas berdampak pada belum optimalnya luaran program penanganan stunting.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Banyumas tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Rajendrakumar et al. menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi, seperti diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, berkontribusi terhadap penurunan risiko stunting sehingga memerlukan keterlibatan berbagai sektor dalam penanganannya (Rajendrakumar et al., 2025). Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Banyumas memiliki karakter multidimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui intervensi kesehatan semata, melainkan membutuhkan sinergi program lintas sektor yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Quamme dan Iversen yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif, transparansi, dan partisipasi publik merupakan faktor utama yang mendorong keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan stunting (Quamme dan Iversen, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun forum koordinasi seperti Rembug Stunting telah dilaksanakan secara rutin, partisipasi aktor non-pemerintah dalam proses perumusan kebijakan masih terbatas. Akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana program dibandingkan sebagai pengambil keputusan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Danso dan Appiah yang menunjukkan bahwa keberadaan forum kolaborasi secara formal tidak selalu menghasilkan kolaborasi yang substantif (Danso dan Appiah, 2023). penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum koordinasi, tetapi juga oleh kualitas partisipasi dan distribusi kekuasaan antaraktor yang terlibat.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Ahmad yang menyimpulkan bahwa tekanan eksternal berupa pandemi Covid-19 mampu mendorong percepatan adaptasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor (Ahmad, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kasus stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut belum mampu mendorong reformasi tata kelola kolaboratif yang lebih substantif. Temuan ini juga menolak sebagian kesimpulan Abdullah et al. menyatakan bahwa tekanan permasalahan publik cenderung menghasilkan respons kolaboratif yang lebih kuat. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik objek penelitian, di mana pandemi merupakan krisis yang bersifat akut dan mendesak sehingga memaksa aktor untuk berkolaborasi secara cepat (Abdullah et al., 2025). Berbeda dengan hal tersebut, peningkatan stunting di Banyumas merupakan masalah kronis yang berkembang secara

bertahap sehingga belum menciptakan urgensi kelembagaan yang cukup kuat untuk mendorong perubahan pola kolaborasi secara signifikan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dominasi Pemerintah dalam Pengambilan Keputusan sebagai Hambatan Struktural Kolaborasi. Temuan menarik yang ditemukan selama penelitian ini adalah adanya dominasi aktor pemerintah daerah dalam hampir seluruh proses pengambilan keputusan terkait penanganan *stunting*, mulai dari perencanaan program hingga penentuan sasaran intervensi. Keterlibatan Bank Jateng, PKK, kader Posyandu, dan akademisi UNSOED yang secara formal terdaftar sebagai mitra kolaborasi dalam kenyataannya lebih bersifat pelaksana instruksi daripada mitra yang setara dalam perumusan kebijakan. Ketidakmerataan Distribusi Intervensi Antarkecamatan sebagai Tantangan Konvergensi. Penelitian ini juga menemukan fakta menarik bahwa distribusi intervensi *stunting* di Kabupaten Banyumas sangat tidak merata antarkecamatan, meskipun secara resmi program penanganan berlaku untuk seluruh wilayah. Kecamatan Cilongok dengan jumlah kasus tertinggi (1.549 kasus) memang menjadi prioritas dalam *Rembug Stunting* 2025, tetapi kecamatan-kecamatan dengan kasus cukup tinggi lainnya seperti Sokaraja (880 kasus) dan Sumbang (820 kasus) belum mendapatkan intensitas intervensi yang proporsional. Ketidakmerataan ini sebagian disebabkan oleh ketergantungan pada laporan berbasis administrasi yang tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan data LARASKIA sebagai alat alokasi program berbasis bukti. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan sistem informasi terpadu yang benar-benar dimanfaatkan secara kolaboratif oleh seluruh OPD dan mitra(Komarudin & Tjenreng, 2025).

Kontribusi Akademisi yang Belum Terhubung dengan Kebijakan (*Research-Policy Gap*). Universitas Jenderal Soedirman sebagai perguruan tinggi terkemuka di Kabupaten Banyumas telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, namun temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil-hasil riset tersebut belum secara sistematis diadopsi sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan *stunting* oleh pemerintah daerah. Ibu Destya Ningtyas, S.Gz. dari UNSOED mengakui bahwa keterlibatan akademisi dalam proses perumusan kebijakan masih bersifat insidental dan tidak terlembagakan dalam mekanisme formal kolaborasi. Fenomena *research-policy gap* ini merupakan temuan menarik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi *collaborative governance stunting* di Indonesia, dan mengindikasikan perlunya mekanisme kelembagaan yang secara khusus menghubungkan output riset dengan proses pengambilan kebijakan daerah(Parlina et al., 2024).

Peran Sektor Swasta yang Terbatas pada Filantropi, Bukan Kemitraan Strategis. Keterlibatan Bank Jateng melalui dana CSR menunjukkan adanya niat baik sektor swasta untuk berkontribusi dalam penanganan *stunting*. Namun penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan tersebut masih berada pada level filantropi reaktif, bukan kemitraan strategis yang terintegrasi dalam sistem tata kelola kolaboratif. Temuan ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa dalam konteks *collaborative governance*, kehadiran sektor swasta secara finansial tidak otomatis berarti terjadinya kolaborasi substantif, apabila tidak disertai dengan desain kelembagaan yang mengintegrasikan kontribusi swasta ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi bersama.

IV. KESIMPULAN

Tata kelola kolaboratif pemerintah dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas telah diterapkan melalui keterlibatan lintas sektor yang mencakup dimensi *strategic resources, performance drivers,* dan *end results.* Meskipun menunjukkan perkembangan positif, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat distribusi SDM yang belum merata, lemahnya integrasi data antarinstansi, serta dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menghambat prinsip kesetaraan kolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui forum rembug *stunting* yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, peningkatan partisipasi substantif aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program penanganan *stunting* di Kabupaten Banyumas.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada cakupan wilayah Kabupaten Banyumas, waktu pengumpulan data yang hanya berlangsung selama dua bulan, serta jumlah informan yang terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aktor dalam tata kelola kolaboratif penanganan *stunting*.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif, kuantitatif, dan longitudinal untuk mengkaji efektivitas tata kelola kolaboratif dalam penanganan *stunting* secara lebih luas, mendalam, dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselesaikannya penelitian ini, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afif Syarifudin Yahya, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir dan para informan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., Emery, C., Xu, Y., & Mensah, F. (2025). Associations between child neglect, informal interventions in food neglect, and child stunting: Evidence from the Ghana families study. *Children and Youth Services Review*, *172*(April), 108273. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108273

Ahmad, S. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, *1*, 80–95. https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/40

Bartolomucci, F., Ramalli, E., & Urbano, V. M. (2026). Integrated governance in data ecosystems: A conceptual framework consolidating collaborative and data governance. *Government Information Quarterly*, *43*(1), 102107. https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102107

Carmine Bianchi, Luis F. Luna-Reyes, E. (2020). *Enabling Collaborative Governance Through Systems Modeling Methods*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6_7

Costabile, C. (2024). Digital platform ecosystem governance of private companies: Building blocks and a research agenda based on a multidisciplinary, systematic literature review. *Data and Information Management*, *8*(1), 100053. https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100053

Danso, F., & Appiah, M. A. (2023). Prevalence and associated factors influencing stunting and wasting among children of ages 1 to 5 years in Nkwanta South Municipality, Ghana. *Nutrition*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.111996

Hendra, A., & Hasan, M. R. (n.d.). *Multi-Actor Governance in Stunting Reduction A Qualitative Study with Contextual Validation in East Jakarta*. *18*(1), 124–157. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/54690

Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(20). https://doi.org/10.3390/ijerph192013591

Komarudin, D., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *11*(2), 733–741. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.5225

Matovu, N., Kizito, N., & Aljohani, M. (2026). Understanding household economic influences on child stunting: A cross-sectional study in Eastern Uganda. *Nutrition*, *147*, 113187. https://doi.org/10.1016/j.nut.2026.113187

Meilinda, S. D., Apriani, A., & Rozie, A. (2025). *COMMUNITY EMPOWERMENT IN LOCAL GOVERNMENT DECISION MAKING : A SYSTEMATIC REVIEW OF MODELS AND IMPLEMENTATION I . Introduction Discussions concerning democracy , involvement , and accountability in local government have put more and more stress on the need*. *10*(1), 1–22. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/5866/2408

Parlina, R., Simangunsong, F., Rizari, & Haposan, T. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.*Pendidikan Dan Ilmu*, *5*(5), 1890–1908. https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2759

Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). Prevalence of child stunting in Sub-Saharan Africa and its risk factors. *Clinical Nutrition Open Science*, *42*(2022), 49–61. https://doi.org/10.1016/j.nutos.2022.01.009

Rajendrakumar, S., Mavhaire, D., Shimly, S., Rahut, D. B., Tharanidevi, N., Ramachandran, V. S., & Timilsina, R. R. (2025). Drivers and barriers towards achieving SDG 6 on clean water and sanitation for all - an Indian perspective. *World Development Sustainability*, *7*(June). https://doi.org/10.1016/j.wds.2025.100228

Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA.

Sumarno, D. A., & Salsabila, L. (2026). *Exploring Governance Structures and Employment Access in Port Development*. *8*(1), 206–226. https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/51267

Suripto. (2024). Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dalam Penataan Hutan Kota untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota

Bandung. *Jurnal Media Birokasi*, *6*(1), 39–53. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4124

Wijayanti, F., Yudha, R., Carolina, C., & Saparita, R. (2023). Inovasi Sosial pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Stunting di Tambak Dahan, Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, *12*(2), 26–36. https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3239

Yahya, A. S., Cahyono, A. S., & Sipayung, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(12), 1181–1190. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.872